

Laporan keuangan BUM Desa: kendala, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan

Andi Iswoyo^{1✉}, Aminatuzzuhro², Yanuar Fauzuddin³

Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang penatakelolaan BUM Desa, persepsi, kendala yang dihadapi dan tantangan dalam menjalankan usaha, dan mengetahui akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan laporan keuangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil subyek pada 2 BUM Desa di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang dengan unit analisis terdiri dari kondisi dan kendala BUM Desa, profesionalitas, keterbukaan dan bertanggung jawab, partisipasi masyarakat, prioritas sumber daya local, dan berkelanjutan. Data diambil dengan observasi dan wawancara mendalam. Analisis data kualitatif menggunakan empat alur kegiatan yaitu catatan lapangan, pengumpulan informasi, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi BUM Desa antara lain pandemi COVID-19, kurangnya sumber daya manusia di bidang keuangan, minimnya pengetahuan tentang standar akuntansi, tidak adanya dukungan berupa pelatihan dan aplikasi laporan keuangan. Dalam tata kelola BUM Desa, sudah menunjukkan kinerja yang baik, akuntabilitas dan transparansi sudah berjalan dengan baik, partisipasi masyarakat terhadap BUM Desa juga sudah bagus. Namun dalam pengungkapan keberlanjutan dalam laporan keuangan hanya BUM Desa Wirausaha yang sudah menerapkan hal tersebut.

Kata kunci: Laporan keuangan; BUM Desa; akuntabilitas; transparansi; keberlanjutan

Village-own enterprise financial report: constraints, accountability, transparency, and sustainability

Abstract

The purpose of this study was to get an overview of the management of VOE, perceptions, constraints faced and challenges in running a business, and find out the accountability, transparency and sustainability of its financial reports. This study used a qualitative approach by taking subjects from 2 VOE in Gresik Regency and Malang Regency, with the unit of analysis consisting of the conditions and constraints of VOE, professionalism, openness and responsibility, community participation, the priority of local resources, and sustainability. Data was taken by observation and in-depth interviews. Qualitative data analysis uses four activity streams: field notes, gathering information, presenting information, and drawing conclusions. The results showed that the obstacles faced by VOE included the COVID-19 pandemic, lack of human resources in the financial sector, lack of knowledge about accounting standards, and lack of support in the form of training and application of financial reports. VoE management has shown good performance, accountability and transparency have been going well, and community participation in VOE has also been good. However, in disclosing sustainability in financial reports, only VOE Entrepreneurs have implemented this.

Key words: Financial report; VOE; accountability; transparency; sustainability

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah dan desa sebagaimana yang termuat dalam program Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan (Sekretariat Kabinet RI, 2019). Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan perwujudan program Nawa Cita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta Pendapatan Asli Desa (PADes) (Suriadi et al., 2015). Keberadaan BUM Desa didasari atas strategi untuk mengurangi kemiskinan secara langsung (Ramly et al., 2019). Data Kementerian Desa PDTT (Kemendes PDTT, 2020) menunjukkan sampai dengan akhir tahun 2022 sudah berdiri 47.158-unit BUM Desa dan 4.199 unit BUM Desa Bersama di seluruh Indonesia atau 63% dari jumlah desa. Dari sisi tenaga kerja, terserap 1.074.754 orang dengan omzet Rp. 1.16 triliun dengan laba bersih Rp. 121 Miliar/Tahun (Susilo et al., 2018).

Perkembangan BUM Desa di Indonesia bukan tanpa kendala, banyak ditemukan BUM Desa yang hanya beroperasi dalam waktu singkat, hingga gulung tikar (Sofyani, Atmaja, & Rezki, 2019). BUM Desa yang dianggap sukses belum mampu memberikan kontribusi terhadap PADes (Prasetyo, 2017). Penyebab utama BUM Desa tidak dapat berkembang baik antara lain karena tidak dikelola secara profesional, tidak akuntabel (Bambang & Suparno, 2017). BUM Desa juga dinilai masih belum memiliki akuntabilitas publik yang memadai, mekanisme tanggung jawab yang dilakukan, baik secara vertikal maupun horisontal masih belum berjalan secara optimal. Kepala Desa masih mendominasi pemerintahan desa, akibatnya semangat korporasi pada bisnis desa tidak dapat diwujudkan. (Kurniasih et al., 2017). Widiastuti et al., (2019) menemukan bahwa tata kelola BUM Desa masih menjadi masalah dimana BUM Desa belum menyusun dokumen tata kelola khususnya dokumen akuntabilitas keuangan, dan keterterapan tata kelola BUM Desa di Indonesia masih relatif rendah, dengan unsur keterterapan terendah pada aspek sustainability dan akuntabilitas. Salah satu hal yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan sustainability BUM Desa adalah adanya sistem informasi dalam penyusunan laporan keuangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperdalam kajian tentang pemahaman dan kendala yang dihadapi perangkat organisasi BUM Desa dalam menyusun laporan keuangan, bagaimana akuntabilitas dan bagaimana kepedulian BUM Desa terhadap tuntutan ekonomi, sosial dan lingkungan di desanya (keberlanjutan).

Subyek yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah BUM Desa Gosari Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dan BUM Desa Dewarejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pemilihan subyek penelitian ini didasarkan pada kategori BUM Desa yang sudah maju dan sudah memiliki status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Pertimbangan ini didasarkan bahwa secara umum BUM Desa yang sudah maju sudah melaksanakan tata kelola (akuntabilitas dan sustainability) dan sudah mampu Menyusun laporan keuangan BUM Desa dengan baik (Widiastuti et al., 2019).

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara, observasi langsung oleh peneliti terkait hal yang diteliti dan dokumen-dokumen yang dimiliki BUM Desa dan Pemerintah Desa dengan unit analisis terdiri dari kondisi dan kendala BUM Desa, profesionalitas, keterbukaan dan bertanggung jawab, partisipasi masyarakat, prioritas sumber daya local, dan berkelanjutan. Lofland dan Lofland dalam (Moleong, 2007) menyatakan bahwa data primer dalam penelitian kualitatif dapat bersumber dari kata dan tindakan serta dapat juga berasal dari dokumentasi dan lain-lain. Selain itu data primer dapat diambil dari informan, kegiatan yang bisa diamati dan dokumen. Terdapat dua tipe informan yaitu pelaku utama dan bukan pelaku utama (Miles & Huberman, 1994), dalam hal ini sumber data primer penelitian ini adalah informan kunci (key informan), informan pertama dipilih secara purposive (sengaja) dalam hal ini adalah Pelaksana Organisasi BUM Desa dalam hal ini Direktur (Kode D1 dan D2), informan berikutnya adalah Kepala Desa selaku Penasihat BUM Desa (Kode P1 dan P2) dan staf bagian keuangan BUM Desa (Kode K1 dan K2). Informan dipilih yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun teori.

Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain

(Sugiyono, 2017). Analisis data kualitatif menggunakan empat alur kegiatan yaitu catatan lapangan, pengumpulan informasi, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994),

HASIL DAN PEMBAHASAN

BUM Desa Wirausaha Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

Desa Gosari terletak di ujung utara Kabupaten Gresik, tepatnya di Kecamatan Ujungpangkah. Desa ini memiliki luas 4,60 Km² atau 4,85% dari luas Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Batas desa ini di sebelah utara berbatasan dengan Desa Cangaan Kecamatan Ujungpangkah, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Desa ini memiliki potensi yang beragam, mulai dari perbukitan, sawah, sumber air dan situs arkeologi.

BUM Desa Wirausaha didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 dengan modal awal Rp. 50.000.000,00 (APBDesa 2018). Dari pengelolaan modal tersebut, pada tahun 2019, BUM Desa Wirausaha membukukan pendapatan sebesar Rp. 5.019.191.203,00 dari jumlah tersebut, BUM Desa mampu berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa) sebesar Rp. 846.721.500,00 atau 16,87%. Pendapatan tersebut diperoleh dari 5 unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa Wirausaha, yaitu:

Unit Tambang, hasil kerjasama dengan PT. Polowijo Gosari, dimana BUM Desa Wirausaha yang menyediakan lahan dan peralatan bagi penyewa dalam hal ini masyarakat untuk menambang batu kapur yang dipotong menjadi batu bata putih. BUM Desa Wirausaha mengawasi proses penambangan mulai dari batas wilayah penambangan hingga kedalaman yang diperkenankan dengan tetap mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan.

Unit Pasar, merupakan asset desa yang dialihkelolakan kepada BUM Desa. Pengelolaan pasar ini meliputi penyewaan stand pasar. Unit usah a ini belum mampu berkontribusi pada pendapatan BUM Desa namun tetap dipertahankan karena merupakan asset desa dan dengan pertimbangan asalkan tidak merugi agar tidak membebani BUM Desa.

Unit Pelayanan Publik, unit ini mengelola sampah rumah tangga melalui penyediaan tenaga dan gerobak sampah keliling yang mengambil sampah di desa. Unit ini murni bersifat sosial, pemungutan biaya pengambilan sampah hanya sebatas pemenuhan biaya yang muncul dari usah a ini, diantaranya biaya tenaga kerja pemungut, biaya truk pembawa ke TPA, biaya perawatan dan pengelolaan TPS. Selain sampah, unit ini juga melayani pembayaran listrik warga dan pembayaran online lainnya. Unit-unit layanan ini juga belum berkontribusi pada pendapatan BUM Desa.

Unit dagang ATK. BUM Desa Wirausaha memiliki unit usaha dagang berupa penjualan alat tulis kantor dan sekolah. Adapun jenis dagangan dan layanan yang diberikan, antara lain: penjualan alat tulis, fotocopy, penjiilan, dan lain-lain. Unit ini mampu berkontribusi pada pendapatan BUM Desa meskipun tidak terlalu besar.

Unit Pariwisata, merupakan unit yang paling besar kontribusinya pada pendapatan BUM Desa selain unit tambang. Unit ini memanfaatkan potensi alam Desa menjadi desa wisata yang kemudian diberi nama Wisata Alam Gosari (WAGOS).

BUM Desa Dewarejo Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Desa Selorejo adalah salah satu desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Adapun batas-batas wilayah Desa Selorejo adalah di sebelah utara berbatasan dengan Desa Gading Kulon – Kecamatan Dau, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Tegalweru – Kecamatan Dau, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Petung Sewu – Kecamatan Dau, dan di sebelah barat berbatasan dengan hutan. Dengan luas wilayah 400 Ha atau 9,53% dari luas kecamatan yang terinci sebagai berikut: Pemukiman/Pekarangan: 26,53 Ha, Tegal/Kebun: 285,47 Ha, Perkebunan: 0,00 Ha, dan Lainnya: 30,00 Ha. Jumlah penduduk Desa Selorejo berdasarkan data BPS Kabupaten Malang adalah Laki-laki 1.887 jiwa dan perempuan 1.905 jiwa total 3.792 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2020).

BUM Desa Dewa Rejo didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendirian BUM Desa. Pada September 2020, BUM Desa Dewa Rejo mendapatkan dana CSR dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Malang yang digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana senilai Rp. 335.427.000,00. Bantuan tersebut disalurkan untuk Argopolitan petik jeruk, yang merupakan usaha unggulan di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Potensi Desa Selorejo dikembangkan adalah pariwisata. Potensi tersebut meliputi; potensi fisik lingkungan alam, tata lingkungan perkampungan yang unik dan khas, arsitek bangunan yang unik dan khas serta bentang kontur alam yang elok (A. B. Sinaga et al., 2012). Potensi-potensi tersebut saat ini dikelola oleh BUM Desa Dewa Rejo Desa Selorejo, yang mengelola beberapa unit usaha, diantaranya:

Usaha perkebunan jeruk, memiliki lahan seluas 25Ha yang semuanya ditanami jeruk, setengah diantaranya (12,85Ha) dikelola secara mandiri oleh BUM Desa sedangkan sisanya disewakelolakan kepada masyarakat sekitar. Usaha ini merupakan sumber pendapatan utama dari BUM Desa.

Usaha Jasa, meliputi penjualan pulsa/token listrik, layanan pembayaran listrik, BRILink, pembayaran tagihan BPJS, dll.

Usaha Pariwisata Perkebunan Jeruk dan Budaya/Event Tahunan. Potensi wisata alam yang dimiliki oleh desa Selorejo adalah Wana Wisata Petik Jeruk Baby Java yang memiliki luas sekitar 200 Ha. Di wisata petik jeruk ini wisatawan dapat memetik sendiri buah jeruk Baby Java dari pohonnya secara langsung dan juga dapat membawa pulang jeruk dengan cara membeli untuk buah tangan (oleh-oleh). Selain Wana Wisata petik jeruk Baby Java, Selorejo juga memiliki Bumi Perkemahan Bedengan dimana wisatawan dapat berkemah di alam bebas dan menikmati sungai ataupun air terjun yang terdapat di sekitar area Bedengan.

Perkembangan BUM Desa dan Laporan Keuangannya

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, peneliti memberikan sejumlah pertanyaan kepada informan kunci terkait beberapa hal, diantaranya adalah bagaimana perkembangan BUM Desa saat ini, bagaimana sistem pengelolaan keuangannya, kendala yang dihadapi, dampak, kebijakan pemerintah, kendala dalam pengelolaan keuangan.

Perkembangan usaha di kedua BUM Desa cukup terpuak karena dampak Pandemi COVID-19. Kedua BUM Desa dalam kondisi bertumbuh pada awal tahun 2020 begitu merasakan dampaknya, sebagaimana yang disampaikan oleh informan D1, sebagai berikut:

Perkembangannya ya cukup bagus, meski saat pandemi kemarin cukup berdampak, pengunjung turun sangat drastis ya, apalagi yang 2020 itu, dah tutup setahun (wawancara D1, 17 Juli 2022)

Kondisi tersebut juga dirasakan oleh informan D2, dimana BUM Desa Dewarejo tidak hanya terkena dampak pandemic COVID-19, namun juga masalah sewa tanah kas desa yang dipermasalahkan warganya hingga ke pengadilan, cukup menyita perhatian pengurus dan perangkat desa. Perkebunan jeruk yang dimiliki waktunya panen, namun hasilnya kurang memuaskan, ditambah Pandemi COVID sehingga mereka tidak bisa menjual produknya ke luar kota.

Awal pandemi covid kemarin benar-benar memukul usaha kami, hasil panen kurang bagus, konflik tanah masih hangat-hangatnya, bolak-balik ke kejaksaan, pengadilan, ke kantor polisi dan ditambah kena pandemi. Namun banyak pelajaran yang bisa kami ambil, ya meskipun niat kita bagus, kita sampaikan dengan baik-baik, selalu saja ada warga yang kurang bisa bekerjasama. (wawancara D2, 19 Juni 2022).

Dalam hal pengelolaan keuangan, kedua pengelola BUM Desa menyatakan tidak memiliki kendala yang berarti. Laporan keuangan yang mereka buat saat ini dirasa sudah cukup untuk menangani kebutuhan pertanggungjawaban kepada desa dan masyarakat. Laporan keuangan masih dibuat manual dengan Microsoft Excel namun masih sangat sederhana. Peneliti melihat laporan tersebut sudah cukup baik karena mencatat semua transaksi yang terjadi, namun masih belum sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku. Sama halnya yang sebagaimana disampaikan oleh informan D1, Informan D2 juga juga menyatakan bahwa:

Kita punya tenaga lulusan akuntansi, sangat membantu, kemarin dia minta beli aplikasi akuntansi tapi karena gak ada dana ya dia buat sendiri pake excel. Ya meski masih belum sempurna. Tapi saya kira cukup buat pertanggungjawaban ke desa saat musrenbangdes, buktinya sampai sekarang gak ada permasalahan. Ya meskipun hal itu gak bener juga sih, harusnya sesuai dengan standar yang berlaku. (Wawancara D1, 17 Juli 2022)

Dalam penyusunan laporan keuangan, informan D1 menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi sebenarnya bukan tidak ada, cukup banyak masalah yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi terutama karena semua pengurus bukan orang Akuntansi atau yang memahami keuangan usaha.

Bahkan informan D2 menyampaikan SDM bagian keuangannya bukan orang keuangan, dan hanya belajar otodidak di Youtube bagaimana membuat laporan keuangan.

Kendalanya cukup banyak ya, terutama karena hampir semua pengurus itu bukan orang keuangan, jadi kadang laporan yang dibuat itu kita minta penjelasan lagi. Maunya kita itu yang mudah kita pahami, jadi yang penting saya bisa tahu apakah laba atau rugi. Kalo laba berapa, kalo rugi berapa. (Wawancara D1, 17 Juli 2022).

Meskipun SDM bagian keuangan di tempat informan D1 adalah orang akuntansi, namun masih kesulitan membuat laporan keuangan terutama karena perlu rumus-rumus Microsoft Excel yang rumit dan perlu menggunakan add in macro sehingga perlu pakar. Seperti yang disampaikan oleh informan D2 sebagai berikut:

Kita malah parah mas, mas Antoko itu bukan orang akuntansi, gak paham keuangan sama sekali, tapi ya adanya itu. Kita minta belajar membuat, diskusi, tanya-tanya ke BUM Desa yang lain, tanya ke perangkat desa, dan ya seperti itu jadinya. Full masih manual, gak pake rumus-rumus Excel yang njelimet (rumit). Setau saya ya yang penting diterima desa gitu aja. (Wawancara D2, 19 Juni 2022)

Keterbatasan SDM tersebut sangat disadari oleh kedua pengelola yang menjadi informan penelitian ini, dan mereka juga memahami apa dampak dari kurangnya pemahaman terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Informan D1 menyampaikan hal yang juga hampir sama disampaikan oleh informan D2, sebagai berikut:

Ya dampaknya kadang laporannya dibuat seadanya, langsung laporan aja tanpa rincian pengeluaran dan pendapatan sesuai kaidah akuntansi. Pernah diminta bank aja kita buat sesuai yang diminta, entah bener apa gak. (Wawancara D1, 17 Juli 2022).

Kendala-kendala yang dihadapi pengelola BUM Desa ini disadari juga oleh pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) daerah masing-masing. DPMD Kabupaten Gresik pernah memberikan pelatihan penyusunan laporan keuangan kepada BUM Desa namun masih dirasa kurang terutama tidak adanya pendampingan pasca pelatihan, dan tidak ada aplikasi yang diberikan, sehingga pengurus tidak memiliki panduan yang baik dalam hal ini. Hal yang sama juga dirasakan oleh BUM Desa Dewarejo, dimana belum pernah mendapatkan aplikasi atau program yang dapat digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Hal tersebut mengingat jenis usaha BUM Desa yang beragam dalam satu daerah sehingga perlu adanya aplikasi yang bisa menampung hal tersebut.

Dulu pernah ada pengarahan dari PMD ya, tapi kelanjutannya gak ada. Sepertinya juga karena gak ada pakar disitu, kan usaha BUM Desa itu kan beragam ya, jadi mungkin kesulitan buat aplikasinya (Wawancara D1, 17 Juli 2022).

Selain itu, masing-masing pengurus BUM Desa juga tidak mengalokasikan pendanaan untuk investasi software laporan keuangan karena dirasa akan sia-sia. Hal ini karena mereka memandang tidak adanya pakar dalam pembuatan aplikasi sehingga ketika nantinya ada kendala, program tersebut tidak akan digunakan.

Gak ada, belum ada dana khusus untuk itu. Kalopun ada dana hibah, inisiatif kita sendiri untuk menganggarkan di bidang keuangan. Selama ini sih hanya untuk gaji bagian keuangan saja. Untuk program belum pernah dianggarkan (Wawancara D2, 19 Juni 2022)

Perhatian pengelola BUM Desa terhadap penyusunan laporan keuangan yang kurang tersebut juga ditambah dengan tidak adanya tuntutan baik dari pihak desa, masyarakat maupun lembaga keuangan yang turut mendanai usaha mereka. Ketika ditanya apakah ada tuntutan dari pihak eksternal dalam penyusunan laporan keuangan, informan D2 menjawab:

Gak ada sih, cuma biasanya setahun sekali minta laporan, paling ditanya berapa omsetnya, ada perkembangan atau gak, itu saja sih. (Wawancara D1, 17 Juli 2022)

BUM Desa Wirausaha belum pernah mengajukan pendanaan dari perbankan, hal tersebut dikarenakan belum dibutuhkan

Pernah dapat sih dari Bank UMKM Jatim, tapi sudah selesai dan cuma sekali. Kita pernah ditawari dari BRI, Bank Jatim dan apa lagi lupa, cuma gak kita ambil. Masih belum butuh sih (Wawancara D1, 17 Juli 2022)

Sedangkan dari BUM Desa Dewarejo, pernah mendapatkan hibah dan pinjaman dari Bank BRI. Hibah tersebut berupa pembangunan kantor BUM Desa dan Gudang pengolahan hasil panen jeruk yang berlokasi di belakang kantor BUM Desa. Sedangkan pinjaman dari Bank BRI digunakan untuk pengelolaan usaha budidaya jeruk, pengadaan mesin sortir, pengolahan pasca panen bagi ibu-ibu rumah tangga, dan kebutuhan lainnya. Pihak perbankan juga meminta laporan keuangan, namun diberikan seadanya dikarenakan saat itu masih belum ada tenaga khusus yang menangani bagian keuangan.

Iya, dulu kita nyiapin, cuma ya masih manual buatnya, trus dibantu mereka sih, jadi gak terlalu repot. Maklum ketika itu masih belum ada tenaga khusus keuangan. (Wawancara D2, 19 Juni 2022)

Akuntabilitas, Transparansi dan Keberlanjutan

Untuk mengetahui kebijakan desa terkait BUM Desa, kami mewawancarai Kepala Desa selaku Penasehat BUM Desa. Pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan terkait dengan kebijakan-kebijakan Desa dalam pengembangan BUM Desa. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh desa terkait dengan pengelolaan sudah cukup baik, pengelolaan asset desa yang selama ini terlantar dan atau hanya disewakelolakan kepada pihak ketiga, saat ini dikedua desa dikelola oleh BUM Desa, hal ini sangat berdampak pada kontribusi pengelolaan asset desa tersebut terhadap pendapatan asli desa. Desa juga mampu meningkatkan keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam pengelolaan asset desanya sehingga secara langsung bisa meningkatkan rasa memiliki dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana disampaikan oleh informan P2 yang menyatakan bahwa selama ini asset desa berupa tanah perkebunan desa seluas 25 ha, disewakelolakan kepada pihak ketiga untuk jangka waktu yang belum jelas, saat ini sudah dikelola oleh BUM Desa dan dampaknya cukup terasa.

Sejak didirikan BUM Desa ini sudah saya niatkan untuk mengembalikan fungsi aset desa untuk kesejahteraan masyarakat, dan itu saya percaya banget sama BUM Desa, yg mampu mengelolanya (Wawancara P2, 20 Juni 2022).

Dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan asset desa melalui BUM Desa, kedua informan sama-sama memilih mengutamakan warga desa. Namun, dalam hal pemilihan pengurus BUM Desa dalam hal ini Direktur, Kepala Desa menunjuk orang yang dia percaya dan dianggap mampu, hal ini guna memudahkan komunikasi dan koordinasi, selain itu karena kedua BUM Desa saat itu masih dalam tahap pembentukan sehingga belum ada aturan yang mengatur itu meski keputusan akhir tetap di Musyawarah Desa

Saya mengutamakan pemuda di Desa, dan yg paling menjadi tokoh muda ya yang sekarang jadi direktur BUM Desa, mas Mujib. Dia cukup disegani oleh teman-temannya dan saya sangat yakin dia mampu memimpin BUM Desa, kalo pengurus yang lain mengutamakan warga desa saja dan dianggap mampu. Syukur-syukur yang punya kompetensi di bidangnya (Wawancara dengan P1, 13 Agustus 2022)

Dalam hal pemilihan pengurus BUM Desa yang lain, Musyawarah Desa memutuskan untuk memprioritaskan warga desa yang belum memiliki pekerjaan, namun bagi yang sudah memiliki pekerjaan diperbolehkan terlibat namun bukan dikepengurusan BUM Desa. Keterlibatan warga seperti ini berdampak pada keguyuban warga dalam mengelola BUM Desa. Di BUM Desa Wirausaha Desa Gosari hal seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah dimana budaya gotong royong masih terjaga dan dilestarikan oleh perangkat desa dan warga. Setiap warga dikedua desa diberikan kesempatan yang sama oleh desa dalam berpartisipasi dalam pengembangan BUM Desa.

Iya, semua warga punya kesempatan yang sama, bahkan kita minta untuk terlibat. Yang sudah bekerja ditempat lain juga tetap kita beri peluang bergabung (wawancara dengan P1, 13 Agustus 2022)

Dalam hal pelayanan, BUM Desa memberikan layanan yang setara wajar terhadap pihak manapun di desa. Desa memberikan kesetaraan bagi warga untuk mendapatkan informasi dan peran apa yang bisa diambil untuk berpartisipasi dalam perkembangan BUM Desa. P1 menyampaikan bahwa masyarakat terutama warga diberikan kesempatan yang sama dalam hal layanan dan kesempatan berpartisipasi dalam perkembangan BUM Desa.

Iya pasti, terutama warga ya (Wawancara dengan P1, 13 Agustus 2022)

Salah satu hal penting lainnya dalam pengembangan BUM Desa adalah adanya kepastian hukum. Sebagaimana dalam UU No. 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 7, BUM Desa merupakan entitas berbadan hukum. Kedua BUM Desa yang menjadi tempat penelitian ini sudah mendapatkan sertifikat pendaftaran dari Kementrian Hukum dan HAM RI sejak awal tahun 2022, sehingga sudah berstatus badan hukum BUM Desa. Hal ini menjadikan kedua BUM Desa lebih fleksibel dalam mengelola usahanya, dengan adanya status badan hukum lebih memudahkan BUM Desa mendapatkan akses permodalan dari Lembaga keuangan, diperkenankan mendirikan PT maupun CV.

Dalam hal transparansi yang harus dilakukan oleh BUM Desa, indikator yang bisa digunakan adalah kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, proses yang terbuka, dan regulasi yang memberikan jaminan transparansi. Kesediaan dan aksesibilitas terhadap dokumen pada kedua BUM Desa sudah tersedia cukup baik dan rapi. Dokumen disediakan dalam bentuk hardcopy dalam bentuk dokumen kebijakan, program-program kegiatan, peraturan-peraturan, dan laporan keuangan yang tersedia tiap trimester. Dokumen dalam format softcopy juga disediakan dalam bentuk file pdf yang dibagikan melalui website desa, whatsapp group, dan google drive.

Dalam hal proses yang terbuka, sudah berjalan cukup baik, kedua BUM Desa sudah secara administratif dan teknis berjalan dengan baik. Masyarakat turut terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yaitu melalui Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Musyawarah BUM Desa. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengelolaan BUM Desa secara langsung dengan menjadi karyawan BUM Desa.

Informasi yang dihasilkan juga cukup jelas dan lengkap. Pertanggungjawaban disampaikan melalui sarana yang tepat, yaitu melalui musyawarah desa, dan hasil musyawarah tersebut disampaikan melalui media-media digital yang tersedia. Laporan keuangan meskipun masih sederhana sudah disampaikan laporannya kepada berbagai pihak yang terkait dan rencana pengembangan BUM Desa juga sudah disampaikan dalam Musyawarah Desa.

Informan K1 menyampaikan bahwa, rapat-rapat yang dilakukan BUM Desa tiap tiga bulan merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pengurus terhadap desa dan pihak-pihak yang terkait;

Biasanya seminggu setelah rapat tiga bulanan, rapat BUM Desa dengan perangkat desa ya, itu kita minta ada brosur atau bisa laporan keuangannya sudah ditempel di beberapa tempat, agar warga dapat informasi. Juga saya minta disebar lewat WA group warga (wawancara dengan K1, 13 Agustus 2022)

Media yang digunakan dalam mekanisme publikasi biasanya melalui rapat-rapat baik yang diadakan oleh desa maupun oleh BUM Desa. Informasi yang disampaikan juga terkait dengan kegiatan, kegiatan BUM Desa dan yang paling penting laporan keuangan;

Lewat rapat-rapat yang diadakan oleh BUM Desa, oleh Desa dan pertemuan lainnya (Wawancara dengan K2, 20 Juni 2022).

Lebih lanjut informan K1 menjelaskan

Kegiatan Desa, BUM Desa, Laporan Keuangan dll. Dalam bentuk brosur, selebaran yang difotocopy ditempel di pos RT/RW, balai desa,, kadang saya foto (scan) dan share ke group warga (wawancara dengan K1, 13 Agustus 2022)

Dalam hal kecepatan informasi yang disampaikan, informan menyampaikan bahwa sudah cukup cepat, tiap bulan BUM Desa memberikan laporan ke desa dan laporan keuangannya harus diketahui warga.

Saya kira sudah cepat ya, tiap bulan BUM Desa laporan ke kita melalui rapat dan 2 kali setahun harus ada laporan keuangan yang diketahui warga (wawancara dengan K2, 20 Juni 2022)

Dalam pengamatan terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kedua BUM Desa. BUM Desa Wirausaha sudah memperlihatkan laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi saja, belum ada laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana disyaratkan oleh standar akuntansi keuangan. Namun hal tersebut sudah cukup baik dibandingkan BUM Desa Dewarejo yang hanya menyajikan laporan posisi keuangan saja, laporan yang lain belum bisa ditunjukkan. Hal tersebut dikarenakan tenaga keuangan pada BUM Desa Wirausaha memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Kendala yang dihadapi oleh bagian keuangan pada BUM Desa Wirausaha terutama belum memahami rumus-rumus pada program Microsoft Excel (MsExcel) sehingga beberapa perhitungan masih terpisah-pisah dan belum menggunakan macro. Hal ini terasa menyulitkan ketika perlu mengkonsolidasikan semua catatan, terkadang terlewat.

Saya bisanya yang seperti ini, buat laporan pakai Excel tapi hitung-hitungannya masih manual, dengan rumus penjumlahan saja, tanpa macro. Tapi sudah lengkap laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, ya meski laporan perubahan modal masih belum bisa saya sajikan dan catatan atas laporan keuangan juga belum ada. Tapi menurut direktur ini sudah cukup, jadi ya tidak saya siapkan. (wawancara dengan K1, 13 Agustus 2022)

Sedangkan pada BUM Desa Dewarejo, laporan keuangan dibuat masih sangat sederhana, meskipun sudah menggunakan MsExcel, tapi masih terbatas pada pencatatan transaksi saja, laporan yang dibuat hanya laporan posisi keuangan yang oleh mereka dinamakan laporan laba rugi. Masih banyak catatan-catatan keuangan yang salah penempatan sehingga ada ketidaktepatan dalam perhitungannya. Hal ini lebih dikarenakan kurangnya pemahaman tenaga keuangan dalam bidang akuntansi. Laporan keuangan yang dihasilkan meskipun ada beberapa yang kurang tepat tapi diterima oleh pengelola BUM Desa dan desa sehingga dianggap tidak bermasalah.

Dalam hal keberlanjutan, BUM Desa Wirausaha sudah cukup baik dalam mengungkapkan dalam laporan keuangan. Beberapa biaya untuk pengeluaran terkait lingkungan sudah ada dalam laporan keuangannya.

Contoh diusaha pertambangan itu, kita selalu mengawasi batas luasan dan kedalaman pengambilan batu kapur, kalo gak gitu bisa habis itu termasuk (situs) Goa Butulan, bisa hilang. Itu juga butuh biaya, meskipun tidak besar. ... Ya itu juga sudah dilaporkan dalam laporan keuangan, saya pernah membacanya. Selain itu, dalam laporan keuangan juga sudah diungkapkan tentang (Wawancara dengan D1, 19 Juli 2022)

Lebih lanjut, informan K1 menjelaskan beberapa pengungkapan pengeluaran yang diungkapkan dalam laporan keuangan terkait ekonomi, sosial dan lingkungan, sebagai berikut:

Iya dalam laporan kami munculkan beberapa hal terkait pengeluaran untuk membantu kegiatan-kegiatan desa, perawatan situs Goa Butulan, pengawas tambang, gotong royong warga, dll. Beberapa kegiatan kita libatkan, gotongroyong tiap bulan, ada acara-acara BUM Desa, PKK terlibat di warung-warung di WAGOS, dan banyak lainnya. Ada juga pengeluaran untuk sumbangan warga yang sakit, ada keluarga pengurus BUM Desa yang meninggal, dlsb. (Wawancara dengan K1, 13 Agustus 2022)

Kedua BUM Desa juga sudah mengungkapkan penyerahan sebagian laba BUM Desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) selain itu juga disisihkan untuk upaya mengembangkan usaha atau merevisi usaha yang sudah ada;

Kalo usaha yang saat ini berjalan sudah cukup baik saya kira, meski beberapa meski terus diupdate ya seperti di WAGOS. Kalo pengembangan usaha baru masih belum ada. Dulu pernah mau buat PAM Desa, tapi sekarang PDAM sudah masuk (Wawancara dengan D1, 13 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas diketahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perangkat desa dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa sekaligus sebagai Penasihat BUM Desa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, dimana BUM Desa harus memprioritaskan sumber daya lokal yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia dari desa setempat. Namun hal ini memiliki kelemahan terutama ketika sumber daya manusia yang dimiliki belum memenuhi kebutuhan kompetensi, misalnya pada bagian keuangan. Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi (Luh Putu Eka Yudi Prastiwi et al., 2021), aspek sumber daya manusia, tingkat pendidikan SDM yang baik dan sesuai dengan bidangnya akan berdampak pada tata kelola yang baik juga (Juliman & Muslimin, 2019). Dalam penelitian ini, ketika BUM Desa memiliki staf di bagian keuangan dengan pendidikan yang sama dengan bidangnya yaitu akuntansi dan atau manajemen keuangan, maka penyusunan laporan keuangan akan lebih baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Kemampuan Menyusun laporan keuangan akan berdampak positif terhadap kinerja operasional UMKM (Rinofah et al., 2022). Laporan Keuangan yang disajikan juga akan memiliki akuntabilitas yang baik sehingga dapat dipercaya dan benar-benar menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Akuntabilitas pada kedua BUM Desa dinilai sudah cukup baik. Kedua BUM Desa bisa menyajikan laporan keuangan dengan baik meskipun belum lengkap dan belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku yaitu SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) atau diperbarui menjadi SAK Entitas Privat (SAK-EP). Hal ini disadari bahwa tidak semua orang memahami dengan baik standar akuntansi keuangan (Arifin et al., 2022; D. I. S. Sinaga et al., 2022; Suci Cahyani et al., 2021), selain itu perbankan dan lembaga keuangan juga tidak mewajibkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK dalam pemberian kreditnya (Iswoyo et al., 2019).

Transparansi terhadap laporan keuangan BUM Desa pada kedua subyek penelitian juga sudah berjalan dengan baik. Transparansi ini diperlukan agar masyarakat mengetahui dengan jelas kondisi aset BUM Desa (Irawati & Martanti, 2018). Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen sudah terpenuhi dengan baik, informasi yang disampaikan juga cukup jelas dan lengkap, proses penyampaian informasi secara teknis dan administratif berjalan dengan baik, pertanggungjawaban disampaikan melalui sarana yang tepat, yaitu melalui musyawarah desa, dan hasil musyawarah tersebut disampaikan melalui media-media digital yang tersedia. Laporan keuangan meskipun masih sederhana sudah disampaikan laporannya kepada berbagai pihak yang terkait dan rencana pengembangan BUM Desa juga sudah disampaikan dalam Musyawarah Desa.

Dalam hal keberlanjutan, BUM Desa Wirausaha menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dan menampilkannya pada laporan keuangannya. Kegiatan kepedulian terhadap lingkungan ini ditunjukkan pada kegiatan pengawasan terhadap usaha pertambangan, perlindungan situs bersejarah Goa Butulan, gotong royong desa, dan lain-lain. Sedangkan pada BUM Desa Dewarejo masih belum menunjukkan kepedulian terhadap lingkungannya pada laporan keuangan BUM Desa, meskipun beberapa kali aktivitas yang dilakukan terkait lingkungan sudah dilakukan, contohnya penggunaan pupuk organik dalam budidaya jeruk. Kepedulian terhadap lingkungan ini merupakan bentuk keberlanjutan yang dilakukan oleh BUM Desa terhadap lingkungannya. Tata kelola BUM Desa berbasis keberlanjutan (Sustainability Development Goal) akan memberikan dampak yang baik terhadap meningkatnya perekonomian masyarakat desa karena secara berkelanjutan karena unit-unit usaha yang dijalankan akan menggerakkan perekonomian desa .

SIMPULAN

Kendala yang dihadapi oleh BUM Desa yang menjadi subyek penelitian ini antara lain pandemi COVID-19 kemarin membuat BUM Desa harus memulai semuanya dengan hal baru, kurangnya sumber daya manusia di bidang keuangan, minimnya pengetahuan tentang standar akuntansi, tidak adanya dukungan berupa pelatihan dan aplikasi laporan keuangan dan tidak adanya kebutuhan laporan keuangan lengkap yang sesuai standar akuntansi keuangan entitas privat oleh pemerintah, perbankan, dan atau lembaga keuangan lainnya. Dalam tata kelola BUM Desa, kedua BUM Desa sudah menunjukkan kinerja yang baik, akuntabilitas dan transparansi sudah berjalan dengan baik, partisipasi masyarakat terhadap BUM Desa juga sudah bagus. Namun dalam pengungkapan keberlanjutan dalam laporan keuangan hanya BUM Desa Wirausaha yang sudah menerapkan hal tersebut. Penelitian ini merekomendasikan agar pelaksana operasional BUM Desa mampu meningkatkan kompetensi staf terutama pada bagian keuangan agar penyusunan laporan keuangan BUM Desa bisa lebih baik dan sesuai dengan standar

akuntansi keuangan yang berlaku. Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan BUM Desa sudah cukup baik, namun diperlukan pengadministrasian yang lebih baik, dan sebaiknya selalu konsisten mengungkapkan keberlanjutan dalam laporan keuangannya. Bagi peneliti selanjutnya, agar bisa memperluas sample penelitian dan menggunakan pendekatan kuantitatif agar hasil penelitian bisa digeneralisasikan lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. A., Inapty, B., & Astuti, Bq. R. D. (2022). Analisis Implementasi SAK ETAP Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 498–505. <https://doi.org/10.29303/RISMA.V2I3.262>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2020). Kecamatan Dau Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang.
- Bambang, & Suparno, C. (2017). Model Analisis Kelayakan Usaha BUMDES Di Kecamatan Kaligondang. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII"*. <http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/viewFile/533/422>
- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2018). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). *UNEJ E-Proceeding*, 41–51. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6665>
- Iswoyo, A., Ermawati, Y., & Nugroho, A. (2019). SMEs Financial Report: Between Quality and Access to Bank Credit. *KnE Social Sciences*, 3(11), 651–679–651–679. <https://doi.org/10.18502/KSS.V3I11.4042>
- Juliman, J., & Muslimin, A. (2019). Optimalisasi Tatakelola Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(1), 471–483.
- Kemendes PDTT. (2020, June 23). Jumlah Bumdes Di Indonesia 2015-2019. <https://lokadata.id/data/jumlah-bumdes-di-indonesia-2015-2019-1592899207>
- Kurniasih, D., Setyoko, P. I., & Imron, Moh. (2017). Problems of Public Accountability in Village Government Business Management (Study on Village Business Enterprises in Banyumas, Indonesia). *Journal of Public Administration and Governance*, 7(4), 147. <https://doi.org/10.5296/jpag.v7i4.11850>
- Luh Putu Eka Yudi Prastiwi, N., Kartika Ningsih, L., & Studi Manajemen STIE Satya Dharma, P. (2021). Peran kompetensi sdm, internal locus of control dan karakteristik wirausaha dalam meningkatkan kinerja umkm. *INOVASI*, 17(4), 835–840. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. In Sage Publications (2nd ed.). SAGE Publications Inc.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya Offset.
- Prasetyo, R. A. (2017). Peranan BUMDES dalam pembangunan dan pemberdayaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, May, 86–100.
- Ramly, A. R., Mekkah, U. S., Wahid, W. A., & Mekkah, U. S. (2019). *Business Analysis Of Village-Owned Enterprises (Bumdes): A Poverty Reduction Strategy (Case Study Kuala Sub-District, Nagan Raya Regency)*. May.
- Rinofah, R., Sari, P. P., & Kriswanto, D. A. (2022). Analisis pengaruh kemampuan menyusun laporan keuangan dan jiwa kewirausahaan terhadap kinerja operasional UMKM. *INOVASI*, 18(2), 369–376. <https://doi.org/10.30872/JINV.V18I2.10527>
- Sekretariat Kabinet RI. (2019). *Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa*. <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-des/>

- Sinaga, A. B., Rizkova, Y., Simamora, H. W., Susepti, A., Ratnasari, M., Wulandari, K. D. S., Mercelina, J. P., Kristian, Y. R., Intan S., A., & Utami, P. P. (2012). Laporan Kajian Desa Selorejo Menjadi Desa Wisata Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
- Sinaga, D. I. S., Nurlaila, N., & Harahap, R. D. (2022). Analisis penerapan sak etap pada bumdesa yang ada di kecamatan pulo bandring kabupaten asahan. *Sibatik journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 97–118. <https://doi.org/10.54443/SIBATIK.V1I3.16>
- Suci Cahyani, K., Kadek Sinarwati, N., Kunci, K., Keuangan, L., & Etap, S. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Badan Usaha Milik Desa Selat. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(2), 331–340. <https://doi.org/10.23887/JAP.V12I2.35768>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Penerbit Alfabeta.
- Suriadi, A., Mahalli, K., Achmad, N., & Muda, I. (2015). The Applicative Model Of The Village_Owned Enterprises (Bumdes) Development In North Sumatera. *Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 3(12), 48–62. www.eajournals.org
- Susilo, A. T., Hidayatullah, A., Pramandaru, A., Noviansyah, D., Wahyudi, H., Arfianto, A., Sarwoaji, W., Ahadi, I. N., Tan, F. M., Hayati, I., & Sulistiyo, A. (2018). *Kata Angka Pembangunan Desa*. Pusat Data dan Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi.
- Widiastuti, H., Manuhara, W., & Rahman, E. (2019). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 257–288.